

TANDA TANYA MUNDURNYA DIRUT AGRINAS

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, tiba-tiba mengundurkan diri Senin (11/8/2025). Surat pengunduran diri itu bertepatan 6 bulan dia memimpin BUMN pangan yang diharapkan jadi motor program swasembada pangan Presiden Prabowo. Joao menyebutkan Agrinas sebagai bagian dari Danantara yang merupakan badan investasi untuk membantu badan usaha milik negara (BUMN). Untuk itu, Agrinas pun dituntut untuk mencapai kinerja terbaik. Sayangnya, lanjut Joao, harapan tersebut tidak terwujud. Bahkan, dia mengatakan tidak terwujudnya keseriusan Presiden Prabowo terkait kedaulatan pangan ini karena tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder dan pembantu-pembantunya, sehingga Agrinas pun tak dapat dukungan maksimal langkah-langkah nyata, termasuk dukungan anggaran. Joao menyebut anggaran sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol. Masalah anggaran ini menjadi salah satu alasan pengunduran dirinya. Di samping itu, juga ada alasan lain termasuk masalah birokrasi. Pengunduran diri ini apakah menjadi kritik terbuka terhadap birokrasi yang dianggap menghambat langkah strategis Perusahaan, sekaligus memicu diskusi tentang komitmen nyata pemerintah dan para pembantunya dalam mendukung program kedaulatan pangan.

[BACA HAL 11...](#)

MENDAGRI : SEPTEMBER PEMDA HARUS SUDAH BENTUK TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber pada sistem layanan publik daerah. Tito menginstruksikan seluruh pemerintah daerah rampung membentuk tim tersebut paling lambat pada 30 September 2025.



Mendagri, Muhammad Tito Karnavian

“**J**adi, intinya, saya kira rekan-rekan untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi insiden kebocoran serangan siber pada sistem data di daerah-daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Pembentukan TTIS telah diatur melalui Surat Edaran Bersama Kemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan TTIS pada Pemerintahan Daerah yang ditandatangani pada 11 Juni 2025.

“Untuk bisa membentuk tim siber ini sudah disampaikan tadi, yang paling pertama adalah bentuk dulu timnya, paling lambat tanggal 30 September. Kemudian SDM-nya, artinya dipilih orang-orang yang mengerti tentang IT (teknologi informasi). Kemudian penyediaan anggaran kepada tim ini,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, pembentukan TTIS harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, untuk kemudian dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsu Tohir.

“Dengan demikian, nanti kita bisa rekap daerah mana yang sudah membentuk tim TTIS ini, dan mana yang belum,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BSSN Rachmad Wibowo menegaskan bahwa pembentukan TTIS merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut tertuang dalam buku 130 Hari Kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam buku tersebut, Presiden menekankan pentingnya membentuk Computer Security Incident Response Teams atau TTIS untuk mendukung rencana digitalisasi seluruh layanan publik.

Rachmad memaparkan, saat ini pemerintah daerah memiliki total 7.347 aplikasi pelayanan. Setiap aplikasi tersebut berpotensi menjadi celah serangan jika tidak dilindungi dengan keamanan siber yang

memadai.

“Adapun, perlunya tim ini dibentuk adalah untuk mengantisipasi rencana pemerintah untuk mendigitalisasi semua pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Kemendagri dan BSSN.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik pernah menekankan pentingnya mitigasi dan sistem cadangan (backup) dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

“Mitigasi dan backup bukan lagi pilihan, tetapi keharusan dalam rangka menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan canggih,” kata Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Teguh Arifiyadi dalam sebuah forum tentang keamanan digital di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Teguh menyampaikan bahwa hampir setiap orang di Indonesia pernah mengalami atau setidaknya menjadi target upaya penipuan digital, mulai dari SMS palsu hingga serangan rekayasa sosial (social engineering).

Menurut dia, lebih dari 90 persen serangan siber bersumber dari manipulasi sosial, yang mengecoh pengguna melalui teknik penayaman identitas digital. “Teknologi deepfake dan rekayasa AI kini bisa mengelabui sistem verifikasi paling dasar. Bahkan

video call bisa dilakukan oleh pihak yang menyamar menyerupai pejabat tinggi. Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa sampai ke level negara,” ujar Teguh.

Dalam konteks transaksi digital, Komdigi mencatat bahwa pada 2024 terdapat lebih dari 250 juta dokumen digital yang ditandatangani secara elektronik.

Teguh mengingatkan bahwa jika proses verifikasi identitas tidak dilakukan dengan standar tinggi, maka potensi penyalahgunaan dokumen bisa sangat besar, terutama jika menyangkut dokumen keuangan atau hukum bernilai tinggi.

Sebagai upaya mitigasi, Komdigi secara rutin mengaudit semua penyelenggara sertifikasi elektronik (CE) dan memperbarui standar keamanan secara harian, bukan hanya tahunan.

Teguh menekankan bahwa standar seperti verifikasi wajah harus mampu mendeteksi apakah data diambil dari kamera atau galeri,

dan membedakan manusia asli dari rekayasa AI.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya sistem backup yang andal guna menghindari kerugian akibat serangan siber.

Teguh juga mengingatkan bahwa keamanan digital tidak bisa hanya diukur dari nilai perangkat atau sistemnya, tetapi dari aset dan data yang dilindungi. “Banyak yang berpikir pagar seharga Rp5 miliar sudah cukup untuk rumah Rp10 miliar, padahal mereka lupa bahwa isi

rumah dan nyawa penghuninya jauh lebih bernilai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Komdigi kini gencar mendorong pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, penyelenggara layanan digital, dan seluruh ekosistem untuk memperkuat proteksi dari serangan siber termasuk dari potensi serangan oleh pelaku dalam (insider threat).

“Tidak ada sistem yang benar-benar kebal. Tapi dengan mitigasi yang matang dan backup yang kuat, kerugian bisa ditekan. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal keberlangsungan layanan dan keselamatan digital masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menegaskan bahwa mencegah kejahatan siber membutuhkan kesadaran kolektif dan kemampuan masyarakat dalam membangun sikap antisipatif terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

“Tidak ada teknologi yang benar-benar aman karena mayoritas pengguna hanya berperan sebagai konsumen dan tidak memahami isi maupun risiko dari sistem yang digunakan,” kata Ardi.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan yang disebut *centric awareness* sangat penting dalam membangun budaya keamanan digital. Konsep ini menekankan pada kepekaan individu dan institusi untuk mengenali ancaman siber dan memiliki kemampuan untuk merespons sebelum serangan terjadi.

Menurut Ardi, kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat penipuan yang sulit dideteksi, seperti menggunakan wajah palsu atau suara tiruan.

Bahkan aplikasi berbasis deepfake kini tersedia secara luas di toko aplikasi, membuat publik semakin rentan. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya simulasi dan latihan penanganan insiden siber. (han,ant/lut)

“**J**adi, intinya, saya kira rekan-rekan untuk menindaklanjuti insiden kebocoran serangan siber pada sistem data di daerah-daerah,”

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Mendagri RI

PULUHAN RIBU TON GULA MENUMPUK DI GUDANG, PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengatakan sekitar 65 ribu ton gula menumpuk di sejumlah Gudang pabrik gula di wilayah Jawa Timur, karena belum laku akibat gula rafinasi membanjiri pasar. Untuk itu, Nasim mendesak pemerintah turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Lebih lanjut, setidaknya ada sekitar 65 ribu ton gula tersebut milik petani di Jawa Timur dikabarkan masih belum laku hingga Senin (11/8/2025). Puluhan ribu ton gula itu kini menumpuk di gudang-gudang milik 17 pabrik gula yang tersebar di 13 daerah di Jawa Timur yaitu PG Wonolangan, Probolinggo; PG Asembagoes, Situbondo; PG Ngadirejo, Kediri; PG Djatiroto, Lumajang; PG Kedawoeng, Pasuruan; PG Gending, Probolinggo; PG Gempolkrep, Mojokerto; PG Lestari, Nganjuk; PG Tjoekir, Jombang; PG Kremboong, Sidoarjo; PG Redjosarie, Magetan; PG Pradjekan, Bondowoso; PG Soedhono, Ngawi; PG Porwodadie, Magetan; PG Semboro, Jember; PG Pandjie, Situbondo; dan PG Wringinanom, Situbondo.

Nasim mengatakan di PG Prajekan, ada sebanyak 4.600 ton gula belum terjual, senilai sekitar Rp 60 miliar; di PG Asembagoes, Situbondo, sebanyak 5.000 ton gula tersisa di gudang, setara Rp50 miliar; Kemudian di PG Panji, sebanyak 2.500 ton gula menumpuk, nilainya sekitar Rp36 miliar. Kemudian, di PG Wringin Anom, sebanyak 3.900 ton gula tidak terserap pasar selama delapan periode terakhir.

Kemudian, gula yang belum laku juga ada di PG Djatiroto, Lumajang sebanyak 8.000 ton. Sementara, itu yang paling sedikit sebanyak 259 ton di PG Kremboong, Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut merupakan data terakhir yang direkap pada Rabu pekan lalu, (6/8/2025) dilansir dari tempo.

Menurut Nasim situasi ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan petani tebu. Sebab, hasil panen yang sudah digiling belum dibayar, sementara beban biaya produksi terus menghimpit "Ini ibarat nyawa di tenggorokan. Petani sudah menunggu pembayaran, tapi gula tidak laku di pasaran," kata Chandra

Sakri Widjaja, GM PG Prajekan, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (11/8/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menandakan masalah tersebut dipicu peredaran gula rafinasi di pasar, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman. Gula rafinasi dikenal berwarna lebih putih, memiliki rasa yang tidak semanis gula pasir biasa, dan harganya lebih murah.

Di pasaran, gula rafinasi dijual sekitar Rp13.600 per kilogram, sedangkan gula produksi pabrik rakyat berada di kisaran Rp14.400. Harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp14.500 per kilogram.

Nasim mengatakan kondisi itu terungkap dalam audiensi anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan General Manager (GM) pabrik gula di Regional 4 Jawa Timur, di Pabrik Gula (PG) Prajekan, Bondowoso, Minggu (10/08/2025).

Akibat stagnasi penjualan, pembayaran kepada petani tertunda. GM PG Asembagoes, Mulyono mengaku sudah empat periode giling



Ilustrasi puluhan ribu ton gula menumpuk di gudang PG karena belum laku.

belum bisa membayar petani. Petani belum menerima pembayaran, padahal tebu mereka sudah digiling. Bahkan, sisa gula dari musim giling sebelumnya masih mencapai 140 ribu ton yang belum terserap pasar.

Sepekan lalu, pengurus APTRI Pusat berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembelian sementara gula oleh

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menggunakan dana

dari Danantara. Skema ini diharapkan bisa membantu mengosongkan gudang dan memberi napas segar pada petani.

Namun, Nasim Khan mengingatkan bahwa ini hanya solusi jangka pendek. Pihaknya akan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi persoalan itu, sehingga gula yang menumpuk di gudang bisa segera terjual, sehingga petani bisa mendapatkan bayaran.

"Kalau bisa tidak menunggu minggu depan, besok pun harus ada keputusan. Di regional ini saja, ratusan miliar rupiah belum terbayar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Nasim Khan menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan gula nasional tanpa harus bergantung pada impor, asalkan tata niaga diatur dengan benar dan petani diberi perlindungan harga.

"Kami yakin SDM kita siap untuk swasembada. Tapi kalau pasar dibanjiri rafinasi, petani kita akan kehilangan semangat," pungkas politisi asal Dapil Jawa Timur III itu.

Terpisah, Ketua Tim Lelang Gula PT SGN, Sunardi Edy Sukamto mengatakan gula petani hingga saat ini masih menumpuk di gudang-gudang gula milik sejumlah pabrik gula di Jawa Timur. "Gula masih belum terserap oleh pasar," ujar Sunardi yang juga Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dilansir Tempo, Senin (11/8/2025).

Sunardi mengatakan pedagang gula tidak ada yang berani membeli karena saat ini banyak beredar di pasaran gula rafinasi serta gula kristal rafinasi. Keberadaan gula tersebut, kata Sunardi, telah merebut gula kristal putih yang dihasilkan oleh tebu rakyat atau gula petani. Sunardi mempertanyakan keberadaan penentu kebijakan terkait dengan persoalan yang dihadapi para petani saat ini. "Kami mati-matian mengusahakan agar tebu bisa terbang. Tapi selama 45 hari terakhir ini kami belum mendapatkan hasil," Sunardi menambahkan.

Ia mengatakan pedagang sampai saat ini masih enggan membeli gula kristal putih dengan harga acuan pembelian sebesar Rp 14.500 per kilogram. Hal ini dikarenakan belum ada jaminan bisa dijual ke pasar. "Peredaran gula rafinasi masih masif membanjiri pasar dengan segala motif pendistribusian dan kemasan serta gula vitamin yang diproduksi dari gula rafinasi ini juga membanjiri pasar. Ini menjadi bencana dan sekaligus mesin penghancur rencana percepatan swasembada gula tahun 2027," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah negara hadir untuk menjaga penghiliran atau hilirisasi gula hasil giling untuk bisa terserap pasar. "Siapakah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan dan mengembalikan pasar gula sesuai dengan peruntukan?" ujarnya.

Sunardi menyebutkan empat hal yang perlu dijalankan supaya sejumlah masalah gula akan terselesaikan. Empat hal itu, antara lain, adalah soal pencairan dana Rp 1,5 Triliun dari ID Food yang dijanjikan cair dalam pekan ini. Kemudian, semua gula produksi giling dibeli negara melalui program cadangan pangan pemerintah. (rls,ist/lut)



Kalau bisa tidak menunggu minggu depan, besok pun harus ada keputusan. Di regional ini saja, ratusan miliar rupiah belum terbayar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan,"

NASIM KHAN
Anggota Komisi VI DPR RI,

Lagi-lagi MBG Tak Layak Konsumsi **DITEMUKAN BELATUNG DI SORONG,** **KERACUNAN DI SUKABUMI DAN LAMPUNG**

Kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) tak layak konsumsi ternyata masih terjadi. Terbaru, heboh di media sosial terkait penemuan belatung di makanan yang dibuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya, sebanyak 18 siswa SDN 1 Way Jaha, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan gratis. Sementara walimurid dari PAUD, SD, dan MI di Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi menolak MBG usai 32 siswa keracunan

Guru Besar Mikrobiologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Ratih Dewanti Hariyadi mengatakan pentingnya memastikan keamanan di seluruh rantai pasok untuk mengatasi kasus-kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Seluruh rangkaian rantai pasok harus dikendalikan keamanannya, sehingga pada saat makan sudah bisa diminimalkan bahaya yang tidak kita inginkan," kata Ratih dalam podcast Badan Gizi Nasional (BGN) dikutip, Senin (11/8/2025).

Ratih menjelaskan makanan yang disajikan dalam MBG, termasuk pangan siap saji. Untuk memastikan makanan aman, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam MBG perlu mengendalikan keamanan mulai dari penanaman, transportasi, hingga distribusi.

"Harus dikendalikan di seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir. Transportasi dan distribusi itu sumber-sumber pencemaran yang harus dikendalikan, belum lagi kalau berbicara bahan baku mungkin tidak cukup hanya di dapur pengolahan, tetapi juga di penanamannya bagaimana, transportasi bagaimana, pengolahannya bagaimana," ujar dia.

Menurutnya, semua rangkaian dalam Program MBG harus memenuhi dan mematuhi pakem utama dalam pengendalian keamanan pangan yang telah tertera dalam manajemen keamanan pangan.

"Bisa dicapai dengan beberapa fondasi sistem manajemen keamanan pangan, mulai dari good agricultural practices di ladang, good farming practices untuk susu dan daging, good aquaculture practices (untuk produk-produk dari laut atau sungai), serta good distribution practices. Kalau di dapur ada good handling practices atau good manufacturing practices," paparnya.

Ia juga menegaskan sistem manajemen keamanan pangan sangat terkait dengan pemenuhan fasilitas, lokasi, dan bangunan dalam rangka menjalankan Program MBG. Selain itu pengawasan berbasis risiko juga perlu



(Ilustrasi) Masih ditemukan MBG yang tak layak konsumsi hingga memicu keracunan. (Dok)

dilakukan.

"Harus ada pengawasan yang cukup baik berbasis risiko. Kita pilih mana yang paling berisiko yang harus kita kendalikan," ucapnya.

Berdasarkan data dari

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), isu keracunan pangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. 1 dari 10 orang dunia mengaku pernah mengalami sakit akibat makanan.

Negara Kucurkan Rp 5 T untuk 5 Juta Orang

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diterima oleh 5 juta lebih masyarakat di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah mengucurkan Rp 5 triliun sejak Januari hingga Juni 2025 untuk membiayai program tersebut.

Total penerima manfaat Makan Gratis telah menyentuh 5.588.419 orang dengan dana hingga Rp 5 triliun tadi sejak Januari hingga Juni 2025. Totalnya anggaran sebesar itu telah mengalir ke 1.864 Satuan Pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG se-Indonesia.

"Melalui APBN #UangKita, negara hadir memberikan asupan gizi yang tepat, terutama untuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan sehat," tulis Sri Mulyani dalam keterangannya di Instagram @smindrawati, dilihat Senin (11/8/2025).

Sejauh ini sudah ada 100 ribu lebih tenaga kerja yang terlibat dalam

program MBG, mulai dari UMKM, petani, nelayan, hingga koperasi lokal.

Adapun, target penerima manfaat MBG juga ditingkatkan, dari 17,9 juta orang, menjadi 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum.

Sri Mulyani juga mencatat makanan bergizi penting untuk meningkatkan kesehatan, mendukung pendidikan, memberdayakan ibu hamil dan menyusui, mengentaskan malnutrisi dan stunting, serta berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan. Tahun 2026, program ini akan terus ditetapkan.

"MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang akan terus dilanjutkan pada 2026," tulis Sri Mulyani.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan realisasi penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 triliun hingga awal Agustus 2025. Angka ini melampaui proyeksi sebelumnya sebesar Rp6

Efek keracunan pangan tidak hanya penularan penyakit, tetapi juga memengaruhi reputasi ekonomi di suatu wilayah karena sangat berpengaruh pada produktivitas. (wid,rls,ant/dya)

BEBERAPA KASUS MBG DI TAHUN 2025

- 16 Januari, Sukoharjo (Jawa Tengah)
Puluhan siswa mual dan sakit perut usai konsumsi MBG.
- 18 Februari, Sumba Timur (NTT)
29 siswa SD alami muntah dan diare.
- 18 Februari, Bombana (Sulawesi Tenggara)
10 siswa keracunan; puluhan paket makanan basi ditarik untuk uji lab.
- 5 Mei, PALI (Sumatera Selatan)
Puluhan hingga ratusan siswa di berbagai sekolah keracunan.
- 22 Juli, Kupang (NTT)
Keracunan massal diduga akibat kelelahan tim dapur SPPG; SOP diperketat pasca-insiden.
- 8 Agustus, Sorong (Papua Barat Daya)
Ditemukan belatung dalam menu MBG; video viral. BGN minta maaf, tarik makanan, hentikan sementara operasional SPPG untuk investigasi dan perbaikan.



triliun dan menandai percepatan signifikan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

"Alhamdulillah penyerapannya sudah menembus Rp7,9 triliun, padahal Juli kemarin kami perkirakan hanya akan mencapai Rp6 triliun," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana pekan lalu.

BGN memproyeksikan anggaran akan terus meningkat dengan estimasi penyerapan Rp9 triliun pada Agustus, Rp19 triliun di September, Rp37 triliun hingga Oktober, Rp59 triliun November, dan mencapai Rp76 triliun Desember 2025. Target ini jauh di atas pagu dalam APBN 2025 yang sebesar Rp71 triliun. (wid,rls,ist/dya)

Gaduh Dugaan Korupsi Haji 2025

MENAG KLAIM SUDAH BERES, KPK: KLARIFIKASI SAMA SIAPA?

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku telah diklarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Namun, Plt Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya belum pernah meminta klarifikasi apapun.

Kegaduhan terjadi terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Saat Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku sudah melakukan klarifikasi, KPK menepisnya.

Bahkan, Plt Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur menyebut, perkara itu belum masuk ke Direktorat Penyelidikan Kedepuitan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK.

"Klarifikasi sama siapa (Menag Nasaruddin)?," ujar Asep, Senin (11/8/2025).

Asep meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kembali kepada Kedepuitan Bidang Informasi dan Data (INDA) Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, yang saat ini sedang melakukan telaah kasus tersebut. Ia juga membuka kemungkinan bahwa klarifikasi dilakukan oleh Kedepuitan Pencegahan dan Monitoring KPK.

"KPK yang mana? Di Dumas mungkin PLPM. Belum ada ke kita. Coba tanya deh (Kedepuitan INDA atau Kedepuitan Pencegahan dan Monitoring KPK). Pokoknya di penindakan belum ada (nangani kasus haji 2025 atau mengklarifikasi Nasaruddin Umar)," ucap Asep.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa laporan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 pada era Menag Nasaruddin Umar masih dalam proses telaah oleh PLPM.

"Sedangkan terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2025, laporan tersebut baru diterima oleh KPK. Tentunya dibutuhkan telaah dan verifikasi awal, apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak," ujar Budi, Senin (11/8/2025).

Budi tidak secara tegas menjawab apakah Nasaruddin sudah diklarifikasi atau belum oleh Direktorat PLPM Kedepuitan INDA maupun Kedepuitan Pencegahan dan Monitoring KPK. Ia hanya menegaskan laporan tersebut masih berada di tahap PLPM yang bersifat tertutup, termasuk mengenai perkembangan dan proses klarifikasi.

"Masih di tahap pengaduan masyarakat, kami tentu belum bisa sampaikan updatenya," kata Budi.



Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar

Pengakuan Menag dan Laporan ICW

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku telah memberikan klarifikasi laporan ICW mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ke KPK.

"Sudah di klarifikasi, sudah diklarifikasi," kata Nasaruddin kepada awak media di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025).

Ia menyebut hasil klarifikasi itu menunjukkan tidak ada masalah dalam penyelenggaraan haji 2025. Namun, Nasaruddin enggan

membeberkan siapa pihak yang mengklarifikasinya.

"Sudah sudah, nggak ada masalah," ucapnya.

Adapun laporan ICW kepada KPK mencakup dua klaster utama, yakni pengadaan layanan masyair dan pengurangan spesifikasi konsumsi bagi jemaah haji. Dugaan korupsi tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar.

ICW melaporkan tiga pihak ke KPK, terdiri dari satu penyelenggara negara dan dua pegawai negeri, pada Selasa (5/8/2025).

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan bahwa korupsi tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp 306 miliar.

"Dengan dugaan korupsi sekitar Rp 255 miliar dan juga pungutan atau pemerasan oleh salah satu pegawai negeri sebesar Rp 51 miliar," kata Wana. (wid,rls,ini/dya)

TEMUAN ICW SOAL DUGAAN KORUPSI HAJI 2025

- **Indikasi monopoli Masyair**
Dua perusahaan layanan Arafah, Muzdalifah, Mina diduga dimiliki satu orang, menguasai ±33% pasar untuk 203.000 jemaah; berpotensi melanggar UU No. 5/1999.
- **Pengurangan spesifikasi konsumsi**
Makanan hanya 1.715-1.765 kalori, di bawah standar 2.100 kalori sesuai Permenkes No. 28/2019.
- **Potensi kerugian negara**
Pengurangan makanan merugikan ±Rp255 miliar; pungli ±0,8 Riyal/porsi menghasilkan ±Rp50 miliar; total kerugian ±Rp306 miliar.
- **Pelaporan ke KPK**
ICW melaporkan 1 penyelenggara negara dan 2 PNS Kementerian Agama sebagai terduga pelaku.



Kerugian Negara di Era Yaquut Tembus Rp 1 Triliun

KPK mengungkap dugaan kerugian negara yang timbul dalam kasus korupsi kuota haji 2024, saat itu Menteri Agamanya adalah Yaquut Cholil Qoumas. Dari hasil penghitungan sementara, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (11/8).

Kasus ini terkait dengan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu untuk tahun 2024. Namun, diduga ada pembagian kuota haji yang tak sesuai aturan.

Budi menjelaskan, kerugian negara itu timbul dari adanya pergeseran antara kuota haji reguler menjadi khusus. Dana haji yang seharusnya bisa didapat negara,

malah mengalir ke pihak travel swasta.

"Nah, kalau kita melihat skemanya ya, yang haji reguler itu kan dikelola langsung oleh pemerintah lewat kementerian agama, sedangkan yang haji khusus ini kan dikelola oleh para agent travel. Ya meskipun pada awalnya itu kan semuanya dana itu masuk di BPKH pengelolaannya awal, sehingga itu juga kemudian menjadi objek keuangan negara," jelas Budi.

"Nah di situ kan ada pergeseran dari yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler, 8 persen untuk haji khusus, karena ada pergeseran menjadi 50-50 atau 10.000-10.000, tentunya juga ada pergeseran di situ," lanjut dia.

Dalam penanganan kasus ini, KPK telah meningkatkannya ke tahap

penyidikan. Meski begitu, masih belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka.

Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara ini bermula pada 2023, saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pemerintah Arab Saudi. Di sana, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20 ribu.

Diduga ada pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan. Asep menyebut bahwa seharusnya pembagian kuota itu seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, yang terjadi, kuota dibagi 50%-50%. (wid,rls, kum/dya)

HASIL VERIFIKASI DI KOTA MALANG: HIPERTENSI JADI PENYAKIT TIDAK MENULAR TERTINGGI



Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang, Muhammad Zamroni. (Santi/Lentera)

MALANG - Kasus hipertensi tercatat sebagai penyakit tidak menular tertinggi di Kota Malang. Fakta ini terungkap dalam pelaksanaan verifikasi lanjutan Kota/Kabupaten Sehat (KKS) tingkat nasional tahun 2025.

"Tadi verifikasi terkait pemenuhan dokumen memang ada yang belum lengkap. Bahwa di Kota Malang ini kasus (penyakit) tidak menular nomor satu itu hipertensi. Nah tadi Kemenkes melihat apakah laporannya sudah sesuai atau belum," ujar Kepala Bidang

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Muhammad Zamroni, Senin (11/8/2025).

Berdasarkan data Dinkes, meskipun tidak menyebutkan angka pasti, menurutnya hipertensi di Kota Malang didominasi oleh kelompok usia dewasa. Namun, tren kasus pada usia muda kini mulai meningkat.

Penyebabnya beragam, mulai dari faktor keturunan, pola makan yang tidak sehat, hingga kurang istirahat.

Zamroni juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat guna mengurangi risiko hipertensi. Ia menyarankan agar masyarakat membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL), serta memperbanyak aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.

"Garam sangat meningkatkan risiko hipertensi. Jadi, anak muda

sekarang jangan makan terlalu asin dan mengurangi lemak," tuturnya.

Lebih lanjut terkait dengan verifikasi KKS, Zamroni menjelaskan, laporan kasus hipertensi di Kota Malang sudah dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Ia memastikan, seluruh warga yang terdeteksi hipertensi juga telah mendapatkan penanganan medis.

"Artinya, masyarakat yang mengalami hipertensi di Kota Malang sudah dilayani sesuai standar, bahkan lebih dari 100 persen. Begitu ditemukan hipertensi, langsung dilakukan penanganan," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui terdapat kendala teknis dalam penyampaian data ke Kementerian Kesehatan. Laporan pelayanan yang sudah dilakukan seringkali terhambat karena gangguan pada aplikasi Aplikasi Satu Sehat Indonesia (ASIK).

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menambahkan kondisi hipertensi ini juga terjadi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang. Data

dari fasilitas kesehatan menunjukkan tren yang sama, di mana tekanan darah tinggi dapat dipicu oleh faktor keturunan, pola makan, tekanan pekerjaan, maupun masalah pribadi.

"Biasanya dokter akan melihat riwayatnya. Darah tinggi bisa jadi turunan, atau dari makanan, atau dari tekanan, ya. Atau faktor lainnya," kata Wahyu.

Menurutnya, hipertensi menjadi salah satu dari tiga penyakit utama yang ditanggung BPJS Kesehatan di Kota Malang, selain diabetes dan penyakit jantung. Ketiga penyakit tersebut dinilai berhubungan erat dengan gaya hidup.

Wahyu pun mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan, mengelola stres, dan membiasakan diri berolahraga. Ia menekankan, suasana hati yang rileks dan pikiran yang tenang menjadi kunci menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah.

"Makannya, nggak usah minder terlalu serius. Terlalu serius itu malah bikin tegang. Kita agak guyon-guyon, itu malah bisa menurunkan tekanan darah," ujarnya sambil tersenyum. (Santi/Dya)

RSUD KANJURUHAN DIGELONTOR DBHCHT SEBESAR RP32,75 MILIAR DI 2025

MALANG - RSUD Kanjuruhan pada tahun 2025 ini menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp32.754.304.480. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17 miliar dialokasikan untuk pembangunan perluasan Unit Gawat Darurat (UGD) hingga empat lantai.

"Secara garis besar, RSUD Kanjuruhan memperoleh anggaran DBHCHT tahun 2025 sebesar Rp32,75 miliar, itu sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dari total kegiatan yang ada, anggaran paling besar digunakan untuk pembangunan perluasan UGD lantai 1-4," ujar Direktur RSUD Kanjuruhan, dr. Nur Rochmah, MMRS, dikonfirmasi pada Senin (11/5/2025).

Menurut mantan Dirut RSUD Lawang tersebut, perluasan UGD ini dirancang untuk menambah kapasitas tempat tidur dan fasilitas perawatan intensif. Peralannya selama ini, ketersediaan bed yang ada dirasa masih sangat terbatas hingga menyebabkan UGD over kapasitas.

"UGD dan ICU kami sering penuh. Jadi dengan perluasan ini akan ada

penambahan bed. Kemudian mulai lantai satu sampai empat akan dilengkapi ICU, ICCU, PICU, dan NICU," terang Rochmah.

Selain perluasan UGD, DBHCHT 2025 juga digunakan untuk rehabilitasi Gedung Diponegoro dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Menurutnya, proyek ini menjadi bagian dari program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan.

Lebih lanjut, di sisi pengadaan alat kesehatan, RSUD Kanjuruhan juga mengalokasikan anggaran Rp3,69 miliar untuk enam unit peralatan. Rinciannya, lima unit brankar transfer pasien dan satu unit Picture Archiving and Communication System (PACS) untuk distribusi digital hasil pemeriksaan radiologi.

"PACS ini mempercepat distribusi hasil radiologi ke dokter pelaksana dengan akurasi lebih baik," jelas Rochmah.

Tak hanya itu, anggaran DBHCHT 2025 juga dialokasikan sebesar Rp4,7 miliar untuk pemeliharaan rutin dan berkala dari 51 unit alat kesehatan canggih. Di antaranya, yakni X-ray, panoramic, Ultrasonografi (USG), CT-

Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Elektrokardiogram (EKG), ventilator, dan peralatan anestesi.

Dikatakannya, pemeliharaan alat-alat canggih tersebut memerlukan dana besar, karena dilakukan minimal empat kali dalam setahun, mencakup kalibrasi setiap tiga bulannya.

Rochmah juga menyebut, peningkatan alokasi DBHCHT tahun ini cukup signifikan. "Tahun 2024 kami menerima Rp17 miliar, dan tahun ini naik hampir dua kali lipat menjadi Rp32 miliar," katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Kanjuruhan, Yudiono, S.KP, M.Kes, menambahkan pembangunan perluasan UGD juga akan mengakomodasi unit stroke, perinatologi, kamar bersalin, dan ICU tambahan di lantai empat.

"Kapasitas tempat tidur yang saat



Pemanfaatan DBHCHT 2025 untuk pembangunan perluasan UGD RSUD Kanjuruhan, Senin (11/8/2025). (Santi/Lentera)

ini 240 unit diharapkan bisa bertambah menjadi lebih dari 260 unit," ujarnya.

Dijelaskannya, seluruh pembangunan dan pengadaan yang dibiayai DBHCHT di RSUD Kanjuruhan ditargetkan selesai pada akhir 2025 mendatang. "Dengan tambahan fasilitas ini, kapasitas layanan, khususnya di UGD, kami berharap meningkat dan mampu mengatasi kendala over kapasitas yang kerap terjadi," kata Yudiono. (Santi/Dya)



Presiden Filipina Ferdinand Marcos berbicara dalam konferensi pers di Istana Malacanang, Manila, pada 11 Agustus 2025. (Foto: AFP)

MARCOS JR: FILIPINA BISA TERSERET PERANG CHINA-TAIWAN

Presiden Filipina, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., pada Senin (11/8/2025) menyatakan bahwa jika konflik antara China dan Taiwan benar-benar pecah, Filipina akan ikut terseret ke dalam peperangan tersebut.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya dan akan merebut kembali pulau tersebut meski harus memakai kekuatan militer. Taiwan menolak klaim China dan menegaskan sebagai negara berdaulat bukan bagian komunis RRC.

"Jika ada perang di dekat kami, apa yang bisa kami lakukan? kami tak bisa mengacuhkan itu," kata Bongbong seperti dikutip dari Reuters.

"Maka, mau tidak mau, meskipun kita sangat ingin menghindari konfrontasi dengan siapa pun dan di mana pun, perang atas Taiwan akan menyeret Filipina, dengan terpaksa, ke dalam konflik tersebut," ujar Bongbong.

Marcos mengatakan, Filipina harus punya persiapan tersendiri bila Taiwan dan China benar-benar berperang. Sebab, selain kedekatan geografis ada banyak pekerja Filipina yang mengais rezeki di Taiwan.

"Saya harap itu tidak terjadi. Tapi jika itu terjadi, kita harus sudah merencanakannya," kata Marcos.

"Filipina tidak mungkin bisa menghindarinya hanya karena lokasi geografis fisik kita. Jika terjadi perang habis-habisan, maka kita akan terseret ke dalamnya," papar dia.

Wawancara Bongbong ternyata menyulut kemarahan China. Beijing bahkan sudah mengajukan protes diplomatik dan menyebut Filipina bermain api dengan mengangkat masalah Taiwan yang dianggapnya sensitif.

Adapun hubungan Filipina dan China belakangan ini tak harmonis akibat rangkaian insiden di Laut China Selatan.

Kondisi semakin buruk setelah Filipina meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat sejak Bongbong dilantik.

Sementara itu, Tiongkok memprotes pekan lalu dan menuduh Marcos mencampuri urusan dalam negerinya dan melanggar kebijakan

"Satu Tiongkok" ketika ia mengatakan kepada para wartawan di sela-sela kunjungannya ke India bahwa Filipina tidak mungkin terhindar dari kemungkinan perang di Taiwan karena kedekatan negaranya dengan Taiwan dan keberadaan sekitar 200.000 pekerja Filipina di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan telah berulang kali mengancam akan mencaploknya, dengan kekerasan jika perlu.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok kemudian mengatakan

melalui seorang juru bicara bahwa "lokasi geografis" dan "jumlah besar warga Filipina" di Taiwan tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan negara lain" dan mendesak Filipina "untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip Satu Tiongkok" dan "menahan diri dari mempermasalahkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan inti Tiongkok."

Ketika diminta mengomentari protes China, Marcos mengatakan dia bingung dan tidak dapat memahami kekhawatiran Beijing.

"Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, bermain api? Saya hanya menyampaikan fakta. Kami tidak

ingin berperang, tetapi saya pikir jika terjadi perang di Taiwan, kami akan terseret, kami akan terseret, suka atau tidak, dengan susah payah," kata Marcos. "Kami akan terseret dan terseret ke dalam kekacauan itu. Saya harap itu tidak terjadi, tetapi, jika terjadi, kita harus sudah mempersiapkannya." (Reuters, ABCNews,ist/nei)

Kronologi Eskalasi Ketegangan China-Taiwan Tahun 2025

- Januari – Tiongkok patroli tempur lintas Selat; Taiwan latihan pertahanan dan simulasi invasi.
- April – Latihan militer besar Tiongkok "Strait Thunderbolt-2025A" simulasi blokade dan serangan.
- Mei – Kapal Tiongkok bertahan di perairan Taiwan; AS dan Prancis peringatkan ancaman perang.
- Juli – Kapal Tiongkok empat kali masuk Kinmen; Taiwan latihan "Han Kuang" 20.000 pasukan.
- Agustus – Filipina khawatir terseret konflik; AS tarif 20% impor Taiwan; Tiongkok rilis dokumenter militer; delegasi AS kunjungi Taiwan.



2 Kapal Tabrakan di Laut Sengketa saat Kejar-kejaran

DUA kapal milik China dilaporkan bertabrakan ketika tengah mengejar kapal patroli Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan. Salah satu kapal China mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.

Otoritas Filipina merekam insiden tabrakan antara kapal Angkatan Laut China dan kapal Penjaga Pantai China, lalu merilis rekaman video tersebut ke publik.

Juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela, dikutip dari AFP pada Senin (11/8/2025), mengatakan bahwa insiden tabrakan sesama kapal China itu terjadi di dekat Scarborough Shoal yang disengketakan, ketika Penjaga Pantai Filipina sedang mengawal kapal-kapal yang mendistribusikan bantuan untuk para nelayan di area tersebut.

Video yang dirilis Manila menunjukkan sebuah kapal Penjaga Pantai China dan sebuah kapal yang ukurannya jauh lebih besar dengan nomor lambung 164 bertabrakan dengan suara keras.

"CCG (kapal Penjaga Pantai China) 3104, yang sedang mengejar (kapal Penjaga Pantai Filipina) BRP

Suluan dengan kecepatan tinggi, melakukan manuver berisiko dari sisi kanan belakang kapal (Filipina), yang menyebabkan tabrakan dengan kapal perang Angkatan Laut PLA (Tentara Pembebasan Rakyat)," kata Tarriela.

"Hal ini mengakibatkan kerusakan substansial pada haluan kapal CCG, sehingga tidak laik laut," ujarnya.

Tidak diketahui secara jelas apakah ada korban luka dalam insiden yang terjadi pada Senin (11/8/2025) tersebut.

Tarriela mengatakan kepada AFP bahwa para awak kapal China "tidak pernah menanggapi" tawaran bantuan dari kapal-kapal Filipina setelah insiden tabrakan itu terjadi. Dia juga menambahkan bahwa kapal BRP Suluan milik Filipina sempat "diserang dengan meriam air" oleh kapal China, namun "berhasil" menghindarinya.

Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan komentar atas laporan insiden di Laut China Selatan tersebut. Insiden ini merupakan yang ter-baru setelah serangkaian

konfrontasi antara China dan Filipina terjadi di perairan Laut China Selatan, yang menjadi sengketa kedua negara. Beijing mengklaim hampir seluruh perairan strategis tersebut meskipun ada putusan internasional yang menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Lebih dari 60 persen perdagangan maritim global melewati perairan yang disengketakan banyak negara tersebut. Scarborough Shoal yang menjadi lokasi insiden merupakan rangkaian terumbu karang dan bebatuan berbentuk segitiga, yang menjadi titik rawan konflik antara kedua negara sejak China merebutnya dari Filipina pada tahun 2012 lalu. (AFP, ABS-CBN, ist/nei)

GELANG MAGNETIK UNTUK NYERI SENDI, MITOS ATAU FAKTA?

Gelang magnetik kini semakin diminati sebagai metode terapi alternatif untuk meredakan nyeri sendi dan otot, termasuk pada penderita arthritis, nyeri di tangan, serta kelelahan otot harian. Meski demikian, keampuhannya masih menjadi perdebatan di kalangan medis. Berbagai iklan dan produk yang beredar mengklaim bahwa medan magnet pada gelang mampu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, serta mempercepat pemulihan nyeri. Daya tarik gelang ini semakin besar karena penggunaannya praktis, minim efek samping yang diketahui, dan mudah diperoleh di pasaran.

Namun, benarkah secara ilmiah magnet mampu memengaruhi fungsi biologis tubuh manusia hingga dapat mengatasi masalah sendi dan otot? Artikel ini akan membahas secara kronologis dan mendalam perkembangan klaim seputar gelang magnetik, memaparkan hasil uji klinis yang telah dilakukan, serta mengulas tanggapan komunitas medis terhadap terapi tersebut. Selain dari sisi teori, pembahasan juga akan mencakup potensi risiko, efek plasebo, dan pilihan pengobatan alternatif lain yang telah terbukti efektif.

AWAL MULA KLAIM

Konsep gelang magnetik berawal dari keyakinan bahwa medan magnet dapat memengaruhi aliran darah dan metabolisme tubuh manusia, sehingga berpotensi meredakan nyeri otot dan sendi. Dikutip dari buku *Terapi Magnet: Menggali Energi untuk Penyembuhan dan Kesehatan* karya Tresno Saras (2023), gelang magnetik dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan meningkatkan aliran energi di dalam tubuh. Gelang ini bisa dipakai sepanjang hari dan memberikan manfaat terapi magnetik tanpa mengganggu aktivitas harian.

Namun, magnet yang digunakan dalam gelang konsumen memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan perangkat medis

seperti MRI, sehingga dampaknya terhadap hemoglobin atau jaringan tubuh secara biologis sangat minim. Selain itu, medan magnet statis tidak terbukti mampu menembus jaringan tubuh hingga mempengaruhi proses penyembuhan internal, meskipun sering diklaim sebaliknya oleh produsen produk tersebut.

Meskipun demikian, narasi tentang manfaat magnetik terus populer, berkembang menjadi berbagai produk seperti gelang tembaga, gelang ionisasi, hingga chip terapi yang semuanya berlandaskan asumsi bahwa medan magnet dapat menyelaraskan energi tubuh. Namun, pandangan ini belum mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga kesehatan internasional.

Uji Klinis Terhadap Arthritis

Beberapa penelitian klinis telah dilakukan untuk menilai seberapa efektif gelang magnetik dalam meredakan nyeri, khususnya pada pasien yang menderita arthritis atau radang sendi. Dalam salah satu uji coba acak yang melibatkan ratusan peserta, ditemukan sedikit penurunan rasa nyeri pada mereka yang memakai gelang magnetik dibandingkan dengan kelompok yang menerima plasebo. Namun, perbedaan ini sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik.

Studi tersebut menunjukkan bahwa efek yang dirasakan kemungkinan besar bukan disebabkan oleh medan magnetik, melainkan efek sugesti atau plasebo. Ini adalah fenomena di mana pengguna merasa lebih baik karena mereka percaya bahwa produk tersebut benar-benar efektif. Dalam penelitian medis, efek seperti ini sering muncul ketika peserta tidak mengetahui apakah mereka menggunakan produk yang aktif atau hanya tiruan.

Selain itu, berbagai ulasan ilmiah terhadap studi-studi serupa mengungkapkan bahwa banyak dari

penelitian tersebut memiliki keterbatasan, seperti ukuran sampel yang kecil, kurangnya metode blinding yang kuat, dan potensi bias. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang mendukung efektivitas medis gelang magnetik dalam mengatasi nyeri sendi atau arthritis.

Mitos Populer vs Placebo

Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat, banyak pengguna melaporkan merasa lebih nyaman atau mengalami pengurangan nyeri setelah mengenakan gelang magnetik. Fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh efek plasebo, di mana seseorang merasakan perbaikan gejala hanya karena mereka percaya pada manfaat suatu produk atau terapi, meskipun sebenarnya produk tersebut tidak memiliki efek biologis yang nyata.

Efek plasebo adalah bagian dari respon psikologis tubuh yang dapat terjadi dalam berbagai terapi, termasuk terapi non-ilmiah seperti terapi kristal, aromaterapi, atau pengobatan alternatif lainnya yang belum teruji secara klinis. Perasaan lebih baik yang dialami pengguna bukanlah bukti bahwa gelang tersebut bekerja secara medis, melainkan hasil dari sugesti dan kepercayaan pribadi.

Kondisi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa sebagian besar klaim manfaat dari gelang magnetik hanya berasal dari testimoni atau ulasan pribadi, bukan dari uji klinis berskala besar yang diakui oleh komunitas medis. Tanpa data yang valid, sulit untuk memastikan bahwa kenyamanan yang dirasakan pengguna benar-benar berasal dari gelang magnetik itu sendiri.

Namun, berdasarkan keyakinan Islam, seperti yang dikutip dari buku *Muamalah Syar'iyiah Hidup Barokah* karya Ardhito Bhinadi (2018),

penggunaan gelang magnetik untuk tujuan medis, dengan dukungan bukti ilmiah, pada dasarnya adalah halal. Namun, bisa menjadi haram jika penggunaannya dikaitkan dengan praktik klenik yang dapat menjurus pada kesyirikan.

Risiko dan Pertimbangan Klinis

Secara umum, gelang magnetik dianggap aman bagi kebanyakan orang yang sehat. Namun, ada kelompok tertentu yang harus menghindari penggunaannya, terutama mereka yang memiliki perangkat medis sensitif terhadap magnet seperti alat pacu jantung, pompa insulin, atau implan elektromagnetik. Gelang ini dapat mengganggu fungsi perangkat tersebut jika dipakai terlalu dekat.

Selain risiko teknis, ada juga risiko psikologis dan pengambilan keputusan yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, ketika seseorang memilih untuk menunda atau meninggalkan pengobatan yang sudah terbukti efektif demi mencoba produk alternatif seperti gelang magnetik. Keputusan seperti ini dapat memperburuk kondisi kesehatan yang seharusnya bisa membaik dengan perawatan medis yang tepat.

Beberapa pengguna juga melaporkan mengalami iritasi kulit ringan atau reaksi alergi terhadap bahan logam tertentu pada gelang, meskipun kasus seperti ini jarang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan produk seperti ini dengan informasi yang lengkap dan bijaksana, bukan hanya mengikuti tren atau kepercayaan tanpa dasar yang kuat. (nei,ist/dya)



50% BABY BOOMER MAIN HP LEBIH DARI 3 JAM SEHARI

Generasi muda selama ini kerap dipandang sebagai kelompok yang paling rawan mengalami kecanduan ponsel. Namun, survei terbaru mengungkap fakta mengejutkan bahwa setengah dari generasi baby boomer kini menghabiskan waktu lebih dari tiga jam setiap hari dengan ponsel mereka.

Temuan ini berasal dari laporan AddictionResource.net yang menyurvei ribuan responden berusia 59 hingga 77 tahun, atau kelompok usia yang dikenal sebagai baby boomer. Hasilnya mematahkan anggapan lama bahwa kecanduan gadget hanya menyerang generasi muda, sekaligus menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan ponsel secara intens juga merambah ke kalangan senior.

Dalam survei tersebut, sebanyak 50 persen responden baby boomer mengaku menggunakan ponsel lebih dari tiga jam per hari, bahkan sekitar 20 persen di antaranya menghabiskan waktu lebih dari lima jam setiap harinya. Angka ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada perangkat digital telah menjadi fenomena lintas generasi.

Pada, menurut pedoman dari AddictionResource.net, orang dewasa disarankan membatasi waktu streaming untuk hiburan tidak lebih dari dua jam per hari. Kenyataannya, banyak lansia kini justru menghabiskan waktu jauh melebihi batas sehat yang direkomendasikan, sehingga meningkatkan risiko berbagai dampak negatif dari penggunaan ponsel yang berlebihan.

Penelitian terpisah oleh Pew

Research pada 2024 memang menunjukkan bahwa hampir setengah remaja Amerika selalu terhubung secara online. Namun, fenomena ini membuktikan bahwa kecanduan digital tidak mengenal batas usia. Meski generasi baby boomer pernah hidup di masa tanpa internet dan ponsel, kini mereka justru menjadi pengguna aktif teknologi digital di usia senja.

Dari total 2.000 responden dalam survei tersebut, sebanyak 40 persen mengaku merasa cemas ketika tidak dapat mengakses perangkat digital. Bahkan, separuh dari mereka langsung memeriksa ponsel dalam satu jam pertama setelah bangun tidur, menunjukkan adanya keterikatan yang kuat terhadap gawai dalam rutinitas harian.

Bryan Driscoll, konsultan HR sekaligus pakar generasi, menegaskan bahwa fenomena ini bukan semata-mata soal penggunaan gadget. Menurutnya, pola interaksi, kebiasaan sosial, dan cara mengakses informasi juga ikut membentuk ketergantungan digital yang kini meluas di berbagai kelompok usia.

"Boomer bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan ponselnya, tapi itu bukan koneksi, melainkan isolasi,"

katanya.

Sementara itu, Ruth Hernandez, konselor kesehatan mental dari AddictionResource.net, mengatakan penggunaan ponsel berjam-jam oleh baby boomer kini bukan lagi hal mengejutkan.

"Banyak dari mereka kini

menggunakan smartphone untuk segala hal, mulai dari kirim pesan ke keluarga, memantau aplikasi kesehatan, baca berita, main media sosial, hingga nonton video," kata Hernandez. "Buat mereka, ponsel sudah jadi bagian dari rutinitas harian sama seperti anak muda."

Menurut Hernandez, survei ini menjadi bukti kecanduan digital bukan milik eksklusif generasi muda.

"Ini mematahkan stereotype lama bahwa orang tua itu gaptek dan enggak peduli soal dunia digital," ujarnya. "Faktanya, baby boomer justru banyak yang sudah beradaptasi dengan cepat. Bahkan, sebagian dari mereka sekarang sama lekatnya dengan layar ponsel seperti kita semua."

Dia menegaskan kebiasaan digital tak lagi bergantung pada usia. Pada akhirnya, teknologi sekarang sudah menyatu dengan cara kita hidup, bekerja, dan bersosialisasi, baik buat mereka yang berusia 25 atau 75 tahun, daya tarik ponsel tetap nyata dan kuat. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Summerween, Makeup Gelap Jadi Primadona Musim Panas

Biasanya, musim panas identik dengan riasan ringan dan gaya yang simpel. Tapi sekarang, tren kecantikan justru berubah arah. Bukan lagi kulit glowing atau tampilan natural, melainkan makeup gelap ala Halloween yang jadi sorotan. Nama tren ini adalah Summerween, gabungan antara 'summer' dan 'Halloween' yang makin populer di dunia kecantikan.

Konsep makeup ini awalnya cuma ada di kartun Gravity Falls, di mana para karakternya merayakan Halloween di tengah musim panas. Siapa sangka, ide iseng ini sekarang jadi inspirasi gaya yang digandrungi banyak anak muda, terutama mereka yang suka tampil beda dan punya nyali.

Lebih dari Sekadar Riasan

Summerween bukan cuma soal makeup, tapi juga keseluruhan look. Ciri khasnya identik dengan warna-warna gelap, terutama hitam. Padukan baju mini hitam, korset, dan sepatu boots tebal untuk menciptakan kesan gotik yang kuat. Aksesori bernuansa horor seperti kalung choker dengan liontin tengkorak atau anting berbentuk kelelawar bisa jadi pelengkap sempurna.

Mata dibuat smokey dengan nuansa abu-abu gelap atau ungu tua. Eyeliner tebal dan presisi menjadi elemen wajib. Untuk bibir, tinggalkan warna-warna cerah dan ganti dengan lipstick merah marun, ungu, atau bahkan hitam pekat. Tampilan ini seolah menegaskan bahwa kecantikan tidak selalu tentang warna cerah. Dengan perpaduan yang tepat, sisi gelap dan misterius pun bisa tampil

memukau di bawah terik matahari.

Untuk tampilan yang lebih tajam, eyeliner bersayap (winged eyeliner) yang tebal dan presisi menjadi elemen wajib. Beberapa bahkan berani menambahkan detail artistik seperti gambar laba-laba kecil, jaring laba-laba, atau tetesan "darah" menggunakan liquid eyeliner berwarna merah.

Eits, jangan lupakan cat kuku hitam glossy atau matte biar "gelap" paripurna. Lebih dari sekadar tren, Summerween adalah sebuah ekspresi diri. Ini adalah tentang merayakan sisi gelap dan unik dari diri kita, tidak peduli apa musimnya. Tren ini membuktikan bahwa kecantikan tidak memiliki batasan warna atau musim.

Summerween di Kalangan Selebriti

Beberapa selebriti juga ikut mengenakan tren Summerween untuk tampil di red carpet. Christina Aguilera misalnya, tampil beda dengan lipstick hitam pekat menggantikan ciri khas lipstick merahnya. Ia mengenakan gaun vintage Versace saat menghadiri premiere *Burlesque: The Musical*. Lalu ada Gabbriette Bechtel yang hadir ke acara pemutaran film horor dengan gaya gothic modern, kulit pucat, rambut bervolume, dan dress hitam penuh potongan unik.

Dukungan terhadap tren ini juga datang dari industri kecantikan. Salah satu brand makeup ternama bahkan merilis koleksi khusus yang terinspirasi dari serial *Wednesday* di Netflix. Koleksi ini punya lip oil dengan warna gelap yang bisa berubah, blush bernuansa kaca patri, dan palet eyeshadow smoky yang cocok untuk

tampilan misterius. Hal ini menunjukkan bahwa gaya yang awalnya niche kini mendapat pengakuan luas.

Popularitas Summerween tidak hanya terbatas pada makeup, tetapi juga memengaruhi tren fesyen. Desainer mulai merancang koleksi musim panas dengan palet warna yang lebih gelap, seperti hitam, abu-abu, dan merah marun, yang sebelumnya lebih sering terlihat di koleksi musim gugur.

Gaya busana gotik, yang dulu dianggap subkultur, kini diadaptasi dan menjadi bagian dari mainstream fashion. Perpaduan antara rok mini, korset, dan sepatu bot tebal menjadi kombinasi yang sering terlihat di media sosial dan festival musik, membuktikan bahwa gaya gelap bisa disesuaikan dengan suasana santai dan ceria.

Tips Makeup Gelap Summerween

Ingin mencoba gaya makeup gelap untuk Summerween? Berikut beberapa tips yang bisa kamu ikuti:

Pilih Fokus Utama

Riasan gelap bisa jadi sangat dramatis. Untuk tampilan Summerween yang seimbang, tentukan satu fitur wajah yang ingin kamu tonjolkan. Misalnya, jika kamu ingin fokus pada mata yang gelap, pasangkan dengan lipstick berwarna nude atau natural.

Gunakan Produk Tahan Lama

Musim panas identik dengan cuaca panas dan keringat, sehingga penting menggunakan produk makeup yang tahan lama seperti primer, foundation, dan setting spray agar riasan tetap

awet dan tidak mudah luntur, serta memanfaatkan produk waterproof sebagai andalan untuk menjaga tampilan tetap segar sepanjang hari.

Tambahkan Sentuhan Musim Panas

Jangan lupakan sentuhan musim panas dalam riasanmu. Kamu bisa menambahkan highlight yang berkilau di tulang pipi dan sudut mata, atau gunakan eyeshadow gelap dengan sedikit shimmer. Kilauan ini akan memantulkan cahaya matahari dengan indah dan membuat tampilanmu terlihat lebih fresh.

Eksperimen dengan Warna

Meskipun temanya gelap, kamu tidak harus terpaku pada warna hitam. Cobalah bermain dengan palet warna lain yang lebih gelap seperti merah marun, ungu tua, biru navy, atau hijau zamrud. Warna-warna ini memberikan kesan misterius namun tetap berani.

Tampilan "Gothic-Glam"

Padukan makeup gothic dengan sedikit kilauan ala glamor. Gunakan eyeliner hitam tebal dengan wing yang tajam, eyeshadow gelap, dan lipstick merah tua. Lengkapi dengan sedikit glitter di bagian dalam mata atau di tulang pipi untuk sentuhan modern.

Pada akhirnya, tren Summerween menunjukkan bahwa kecantikan tidak harus mengikuti aturan. Ini adalah tentang keberanian untuk bereksperimen dan mengekspresikan diri tanpa batasan. Dengan perpaduan yang tepat, gaya makeup gelap bisa menjadi pilihan yang memukau (nei,ist/dya)

Tanda Tanya atas , (dari Hal 1) ...

Atas pengunduran diri tersebut, Joao Angelo De Sousa Mota meminta maaf pada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan padanya untuk memimpin PT Agrinas Pangan Nusantara, hingga enam bulan ini.

"Saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, 11 Agustus 2025, kami menyampaikan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini," ungkap Joao Mota dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia turut meminta maaf atas pengunduran dirinya karena merasa belum bisa memberi kontribusi terhadap ekonomi nasional. "Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani," tuturnya.

"Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara khususnya kepada petani, pada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf," sambung Joao sambil terisak.

Terkait keputusannya untuk mundur dari Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo mengatakan mempunyai visi besar dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya, dia menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum maksimal mewujudkan visi tersebut.

"Danantara dibebankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai suatu badan baru yang bisa melihat peluang bisnis atau peluang investasi. Kami melihat pihak Danantara belum memahami atau tidak memberikan sense of crisis bahwa keadaan pangan kita sedang tidak baik-baik saja," ucap Joao Angelo.

Menurut dia, penting bagi pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan demi keberlangsungan hidup bangsa. Kendati demikian, dia melihat belum ada intervensi yang cukup dari pemerintah terhadap aspek ini, terutama oleh Danantara yang membawahi perusahaan-perusahaan pelat merah bersama Kementerian BUMN.

Dia pun berharap agar pemerintah mampu memberikan dukungan kepada para petani agar bisa lebih produktif. Namun, menurut dia,

pemerintah belum maksimal dalam mengejar target itu, sehingga harga bahan pangan seperti beras masih terus melambung di pasaran.

"Saya begitu bersemangat ingin berkontribusi, ingin terlibat membantu membangun masyarakat petani, membangun pertanian kita, tetapi kami tidak didukung oleh pembantu-pembantu presiden dengan membuat birokrasi yang sangat bertele-tele dan hampir tidak mungkin kita wujudkan," ujar Joao Angelo.

Terlihat bahwa pengunduran diri Joao, juga berkaitan dengan peran Danantara yang dianggap tak mampu menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Joao, Danantara seharusnya memaksimalkan visi ketahanan pangan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Namun, selama enam bulan Joao menjabat di perusahaan plat merah, Danantara disebut tidak bekerja untuk kepentingan itu.

"Keseriusan presiden dalam mendukung menggerakkan upaya untuk kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder dan pembantu-pembantunya, sehingga kami tak dapat dukungan maksimal langkah-langkah nyata, termasuk dukungan anggaran, sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol," katanya.

"Saya mengambil langkah ini demi kehormatan saya. Saya begitu bersemangat ingin berkontribusi dan terlibat membangun masyarakat petani, membangun pertanian kita. Tetapi kami tidak didukung oleh pembantu-pembantu presiden, dengan membuat birokrasi yang sangat bertele-tele," lanjut Joao.

Kata Joao, pemerintah selama ini hanya mampu menguasai 10 persen dari sektor pangan nasional. Sedangkan 90 persen lainnya dikuasai para pengusaha dan pebisnis yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kedaulatan pangan suatu bangsa. "Negara yang tidak bisa menguasai hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya pangan, itu sangat berbahaya," ucap Joao.

Menurut Joao, penting bagi pemerintah mewujudkan ketersediaan pangan serta menjaga ketahanan pangan demi keberlangsungan hidup bangsa. Kendati begitu, Joao melihat belum ada intervensi yang cukup dari pemerintah terhadap aspek ini, terutama oleh Danantara yang membawahi urusan operasional dan investasi di perusahaan plat merah.

Sebelumnya Danantara bakal menyetor modal untuk operasional BUMN pangan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Joao sebelumnya sempat menanggapi

belum ada kepastian terkait dana tersebut. Ia juga belum dapat memperkirakan besaran dana yang dibutuhkan karena belum ada perhitungan dari perusahaan sendiri.

"Kami sekarang belum, kami pernah mau diberikan anggaran Rp 3 triliun tetapi kami tidak memproses itu karena kami menunggu kepastian desain maupun rencana selesai dulu baru, karena kita dalam bekerja kita harus mulai dari DED-nya desain dan engineering-nya," ujarnya di Pos Bloc Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Agrinas tak lepas dari transformasi pangan Nusantara. Untuk diketahui PT Yodya Karya (Persero) resmi mengubah fokus bisnisnya pada sektor pertanian, menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Salah satu tugas BUMN ini adalah untuk mengejar ambisi swasembada pangan di Indonesia.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, sempat mengatakan transformasi ini menjadi bagian dari upaya menuju swasembada sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto. "Ini bagian dari visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk membangun bukan hanya swasembada pangan, tapi untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam Launching Agrinas Pangan Nusantara, di Jakarta pada Rabu (14/5/2025) lalu.

Tiko menyadari perlunya penguatan sektor pertanian di Indonesia. Misalnya, melakukan peningkatan produksi dari lahan-lahan yang terbatas. "Kita tahu bahwa pertanian khususnya padi di Indonesia saat ini sangat kecil-kecil lahannya. Petani ini sekarang (mengelola) ada seperempat hektare-setengah hektare, kemudian kita sudah lama meninggalkan riset bibit," kata dia.

Pada sisi teknologi pun dinilai masih tertinggal. Menurutnya, perlu ada peningkatan adopsi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas demi mencapai target swasembada pangan.

Saat itu, Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan transformasi BUMN yang dipimpinnya untuk menjawab sederet tantangan tadi. "Untuk mengantar bangsa Indonesia menuju satu negara yang berdaulat, berdaulat pangan, dan juga kita bisa membangun ketahanan pangan nasional kita," ucapnya.

"Tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada bangsa yang mampu bertahan tanpa memiliki produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bangsanya. Sehingga Agrinas Pangan menjadi sangat vital dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan bangsa kita," sambung Joao Mota.

Lastas siapa sebenarnya Joao Angelo De Sousa Mota, melansir laman PT Yodya Karya (Persero), yang kini berganti menjadi Agrinas Pangan

Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota merupakan profesional di bidang konstruksi, pertanian, peternakan, dan industri kreatif. Dia diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 32/MBU/02/2025 tertanggal 10 Februari 2025.

Sejak bergabung dengan Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo terpantau hadir dalam berbagai momen strategis perusahaan. Misalnya, ketika menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait pengadaan benih varietas padi Gamagora 7 pada Rabu, 14 Mei lalu.

Joao Angelo juga terlihat hadir dalam penandatanganan kerja sama antara Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Markas Besar (Mabes) TNI AD, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Kerja sama itu dijalin dalam rangka membantu TNI AD mempercepat pembangunan lahan pangan di berbagai daerah di Indonesia.

Tak hanya itu, Joao Angelo juga ikut dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Juli lalu. Proyek KSPP Baturaja itu memanfaatkan 12.000 hektare lahan negara untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

Adapun Joao Angelo menerima penghargaan Dharma Pertahanan Madya dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa, 11 Februari lalu. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian di bidang pertahanan.

Mengacu pada catalogue.nla.gov.au, Joao Angelo merupakan mantan aktivis pro-integrasi Bumi Lorosae. Dia bersama Octavio Soares pernah berkampanye memperjuangkan integrasi Timor Timur-Indonesia di Oslo, Norwegia.

Atas pengunduran diri Joao, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan bahwa operasional PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berjalan normal. Termasuk layanan kepada mitra dan pemangku kepentingan akan dilaksanakan seperti biasa.

Selain itu, Rosan juga akan memproses penggantian posisi Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara. Dia mengatakan proses transisi kepemimpinan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan terencana untuk memastikan kelancaran program strategis serta kesinambungan arah dan tujuan perusahaan. (ant,ist/lut)



DPRD JATIM SAMPAIKAN CATATAN KRITIS ATAS PENDAPAT GUBERNUR TERKAIT RAPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Suasana rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Senin (11/08/2025).

SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pendapat Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Senin (11/08/2025).

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menilai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur menjadi alasan kuat perlunya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Musyafak yang juga memimpin rapat paripurna tersebut, menegaskan Perda baru ini sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya kasus kekerasan.

“Banyaknya kekerasan dan tindakan tidak menyenangkan bagi anak adalah keprihatinan tersendiri yang harus mendapat perhatian dari Pemprov. Sehingga kami melihat

perlunya perda ini untuk dilahirkan,” ungkap Musyafak Rouf.

Raperda ini akan menggabungkan dua Perda lama, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penggabungan tersebut diharapkan mampu menyederhanakan koordinasi lintas sektor sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim, Laili Abidah mendesak agar Raperda ini untuk segera dibahas dan disahkan. Ia menyampaikan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur dari tahun ke tahun menjadi peringatan keras bagi semua pihak.

“Fraksi PKB berpendapat bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sangat mendesak untuk segera dibahas dan disahkan, mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terus terjadi di Jawa Timur dari tahun ke tahun,” katanya.

Menurut Laili, penggabungan dua perda lama menjadi satu regulasi

akan memudahkan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab satu instansi.

“Ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Harisandi Savari memberikan catatan agar Raperda yang akan dibahas mengakomodir peraturan perundang-undangan terbaru. Ia menyebut di antaranya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

PKS juga menyoroti maraknya kekerasan berbasis digital yang turut menimpa perempuan dan anak. “Pembahasan Raperda ini harus mengakomodir ketentuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak secara digital/daring sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan UU TPKS,” ujarnya.

Selain itu, PKS meminta agar norma agama, adat istiadat, dan nilai sosial yang berlaku di Jawa Timur tetap dijunjung tinggi. Harisandi juga menegaskan perlunya sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberi mandat kepada daerah untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Senada dengan hal tersebut Juru Bicara Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia (PPP-PSI), Mahdi menegaskan keberadaan perempuan dan anak sebagai bagian dari warga negara harus mendapat perlindungan penuh. Menurutnya, hak untuk mendapatkan rasa aman, mengembangkan kehidupan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah adalah hak asasi yang dijamin konstitusi.

“Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur sangat sependapat atas eksistensi perempuan dan anak yang berhak untuk mendapatkan rasa aman, mengembangkan hidup dan kehidupannya. Serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945,” ujarnya.

PPP-PSI juga mengapresiasi keberadaan dua perda lama yang selama ini menjadi payung hukum perlindungan perempuan dan anak di Jawa Timur. Namun, Mahdi menilai peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan masyarakat saat ini.

“Karena itu, perlu diganti dengan regulasi yang lebih relevan,” pungkasnya. (adv,pra/dya)



Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari



Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Laili Abidah